

Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017-2021

Waroko Hakim*, Heriberta, Etik Umiyati

UNJA, Jambi, Indonesia

*Correspondence: warokohakim1717@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama adalah untuk mengevaluasi kemajuan kinerja keuangan pemerintah daerah dan indeks pembangunan gender di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Tujuan kedua adalah untuk menilai dampak kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan gender di wilayah tersebut. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel, yang menggabungkan data time series dan cross section. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup data time series dari tahun 2017 hingga 2021 dan data cross section dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa secara individual, variabel Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan gender. Hasil analisis bersama-sama menunjukkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini secara signifikan mempengaruhi indeks pembangunan gender, dengan probabilitas sebesar 0,0000 dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,996630. Ini berarti bahwa sekitar 99,66% variasi dalam indeks pembangunan gender dapat dijelaskan oleh model yang digunakan, sementara sekitar 0,34% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model tersebut.

Kata Kunci: IPG, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

ABSTRACT

This study aims to analyze the development of regional government financial performance and the development of the district/city dual development index in Jambi Province. The second objective is to analyze the effect of local government financial performance on the district/city dual development index in Jambi Province. The analysis model used in this study is panel data regression, which is a combination of Time series and cross section data. This study uses secondary data with the type of panel data, namely a combination of time series data for the period 2017-2021 and Cross Section 11 Regency/City data in Jambi Province. The results of the quantitative analysis on an individual basis variable Degree of Fiscal Decentralization, Regional Financial Independence, and Effectiveness of Regional Original Income have a significant effect on the gender development index. Based on the quantitative analysis carried out, it was found that together the independent variables in the study had a significant effect on the independent variables, namely the gender development index with a probability of 0.0000 and R^2 of 0.996630, which means that the gender development index can be explained by the model of 99.66% while 0.34% influenced by variables outside the model.

Keywords: IPG, Local Government Financial Performance

PENDAHULUAN

Terkait dengan administrasi pemerintahan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur mengenai pembagian dan pembentukan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang mencakup wilayah pedesaan serta wilayah yang terdiri dari provinsi dan kota. Setiap wilayah memiliki hak dan tanggung jawabnya sendiri untuk mengatur dan mengelola penyelenggaraan pemerintahannya dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan kepada penduduknya. Wilayah-wilayah tersebut juga memiliki wewenang untuk mengenakan pajak kepada masyarakat umum sebagai salah satu sumber pendapatan dan kontrol administratif mereka.

Walaupun telah terjadi desentralisasi, pemerintah pusat masih memiliki tanggung jawab untuk menyediakan berbagai sumber dana kepada wilayah-wilayah tersebut, dengan tujuan utama melakukan redistribusi untuk mengatasi ketidaksetaraan keuangan antar wilayah. Namun, banyak

wilayah yang lebih bergantung pada dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat daripada mencoba meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber lokal. Salah satunya adalah Provinsi Jambi, yang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Bahkan di era otonomi daerah dan desentralisasi, jumlah ketergantungan terhadap dana transfer terus meningkat dari tahun ke tahun.

Provinsi Jambi adalah salah satu wilayah yang menerapkan prinsip otonomi daerah, meskipun pengelolaan keuangan mereka belum optimal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi mengalami peningkatan tahun demi tahun dalam total pendapatan, baik itu pendapatan asli daerah maupun dukungan dari pemerintah pusat. Penerimaan pemerintah provinsi tersebut melebihi total pendapatan yang dapat dicapai setiap tahunnya.

Tabel. 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah)

Tahun	Total Belanja	(%)	Total Pendapatan	(%)
2017	13.737.394.249	-	12.903.741.220	-
2018	13.739.981.615	0.02	13.099.387.313	1.52
2019	15.780.620.305	14.85	14.515.718.158	10.81
2020	14.541.452.674	(7.85)	13.454.736.631	(7.31)
2021	14.580.485.133	0.27	13.563.471.143	0.81
Rata - rata	14.475.986.795	1.82	13.507.410.893	1.46

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Tabel 1, APBD Pemerintah Provinsi Jambi menunjukkan fluktuasi dalam pertumbuhannya, terlihat dari realisasi total belanja dan total pendapatan. Pada tahun 2017, terjadi situasi di mana total belanja melampaui total pendapatan, dengan masing-masing mencapai Rp. 13.737.394.249,- ribu rupiah dan Rp. 12.903.741.220,- ribu rupiah. Namun, pada tahun 2019, terjadi peningkatan dengan realisasi total belanja dan total pendapatan masing-masing mencapai Rp. 15.780.620.305,- ribu rupiah dan Rp. 14.515.718.158,- ribu rupiah. Kemudian, pada tahun 2021, terjadi penurunan dengan realisasi total belanja melebihi total pendapatan, yakni masing-masing sebesar Rp. 14.580.485.133,- ribu rupiah dan Rp. 13.563.471.143,- ribu rupiah.

Penting untuk dicatat bahwa kesetaraan dan pemberdayaan gender adalah salah satu tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. SDGs bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan anak laki-laki dan perempuan. Dalam konteks Indonesia, upaya untuk mencapai kesetaraan gender juga tercermin dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009. Pemerintah berkomitmen untuk memajukan pemberdayaan gender sebagai bagian dari perumusan kebijakan, dengan dasar pemikiran bahwa negara Indonesia harus melindungi hak-hak semua warganya, termasuk hak-hak laki-laki dan perempuan.

Untuk mengukur kemajuan dalam mengurangi ketidaksetaraan gender, digunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG). IPG digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat dapat mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan penghidupan yang layak, dengan skor IPG yang mendekati 100 mengindikasikan penurunan ketidaksetaraan gender. Di sisi lain, skor yang jauh dari 100 menunjukkan perbedaan gender yang lebih besar dalam berbagai aspek pembangunan. (Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, 2021).

Peran wanita dalam pembangunan, baik dalam sektor pemerintahan maupun swasta, sangat penting. Banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengadopsi kebijakan dan inisiatif untuk mendorong partisipasi dan kontribusi wanita dalam berbagai bidang. Data mengenai indeks pembangunan gender di Provinsi Jambi, menurut Kabupaten/Kota, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel. 2 Data Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2021 (Persen)

Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kerinci	85.97	86.32	86.68	86.65	86.81
Merangin	87.64	88.01	88.01	88.14	88.24
Sarolangun	90.44	90.29	90.67	90.55	90.81
Batang Hari	84.18	84.49	85.17	85.01	85.23
Muaro Jambi	79.41	80.21	80.29	80.08	81.06
Tanjung Jabung Timur	86.56	87.30	87.76	87.50	87.43
Tanjung Jabung Barat	85.44	85.87	85.68	85.66	85.79
Tebo	90.06	90.22	90.23	90.06	90.40
Bungo	88.15	88.20	88.63	88.54	88.49
Kota Jambi	94.45	94.46	94.14	94.03	94.42
Kota Sungai Penuh	93.98	94.43	94.44	94.31	94.41

Sumber : Badan Pusat Statistik 2021

Dari data di atas, terlihat bahwa tingkat pembangunan gender di Provinsi Jambi sangat positif, dengan sebagian besar Kabupaten/Kota mencapai tingkat >80%. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, karena mereka dapat memberikan kontribusi berharga dalam menyusun kebijakan dan memberikan ide-ide inovatif untuk kemajuan Provinsi Jambi.

Isu gender merupakan salah satu fokus utama dalam pembangunan, terutama dalam pembangunan sumber daya manusia. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan memperkuat lembaga-lembaga yang mendorong kesetaraan gender, data menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses ke sumber daya, partisipasi, manajemen, kinerja, dan penguasaan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial-budaya, dan bidang-strategis lainnya. Keterlambatan perkembangan ini di kalangan kelompok sosial, khususnya perempuan, disebabkan oleh sejumlah masalah sosial yang bersifat saling terkait. Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, penting untuk mengadopsi pendekatan pembangunan yang memperhatikan peran perempuan dan laki-laki, serta melibatkan anak-anak perempuan dan laki-laki.

Oleh karena itu, pengarusutamaan gender menjadi strategi yang sangat penting dalam mencapai pembangunan yang adil, efektif, dan bertanggung jawab bagi semua warga, termasuk perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki.

Berdasarkan pemahaman atas latar belakang ini, diharapkan bahwa wilayah-wilayah dapat mengoptimalkan potensi dan kemampuan yang dimiliki mereka dalam konteks pelaksanaan desentralisasi fiskal, dengan mengandalkan pendapatan asli daerah dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2017-2021." Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, dua tujuan utama diajukan, yaitu menganalisis perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah serta perkembangan indeks pembangunan gender di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Tujuan kedua adalah untuk menilai dampak kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan gender di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.

METODE

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis model regresi data panel, yang menggabungkan data dari dua jenis, yaitu data time series yang mencakup periode tahun 2017-2021, dan data cross section dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data sekunder ini dapat berasal dari hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau diperoleh dari sumber lain, seperti yang dijelaskan oleh Fitri pada tahun 2020. Sumber data yang digunakan mencakup data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, serta referensi dari studi kepustakaan melalui jurnal, artikel, makalah, penelitian sebelumnya, dan bahan-bahan lain yang diperoleh dari perpustakaan UNJA, internet, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

Secara lebih spesifik variabel- variabel yang akan digunakan adalah :

1. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender didalam penelitian ini di peroleh dari Laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi dalam satuan persen.

2. Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal yang menunjukkan perbandingan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah (TPD). Untuk melihat sejauh mana desentralisasi keuangan, gunakan skala interval pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

3. Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Derajat Ketergantungan, yaitu perbandingan total pendapatan transfer dari pemerintah pusat terhadap total pendapatan daerah. Untuk memeriksa dependensi, gunakan kriteria yang terdapat dalam tabel berikut

Tabel 4. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Prosentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Sebagai pedoman dalam melihat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel. 5 Kriteria Penilaian Efektivitas PAD

Presentase	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

HASIL

Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi.

Tabel. 6 Output Fixed Effect Method

Dependent Variable: IPG
 Method: Panel Least Squares
 Date: 02/22/23 Time: 00:00
 Sample: 2017 2021
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 11
 Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	93.08471	1.781514	52.25033	0.0000
DDF	0.105036	0.034314	3.060994	0.0039
KKD	-0.060002	0.021216	-2.828151	0.0072
EPAD	-0.008089	0.002504	-3.229992	0.0024

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	0.228500	R-squared	0.996630
Mean dependent var	88.20727	Adjusted R-squared	0.995561
S.D. dependent var	3.972350	S.E. of regression	0.264652
Akaike info criterion	0.394529	Sum squared resid	2.871671
Schwarz criterion	0.905486	Log likelihood	3.150459
Hannan-Quinn criter.	0.592120	F-statistic	932.6714
Durbin-Watson stat	2.288753	Prob(F-statistic)	0.000000

Dari Hasil output dari regresi panel data dengan metode *Fixed Effect* diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$IPG_{it} = 93.08471 + 0.105036DDFit - 0.060002KKD_{it} - 0.008089EPAD_{it} + u_{it}$$

(0,0039) (0,0072) (0,0024)*

R-squared : 0.996630
 Adjust R-squared : 0.995561
 Prob (F-statistic) : 0,000000

Pembahasan

Konstanta

Nilai koefisien konstan adalah 93.08471, yang mengindikasikan bahwa jika Derajat Desentralisasi, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah tetap konstan atau tidak mengalami perubahan, maka Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota Provinsi Jambi akan meningkat sebesar 93.08471. Dengan kata lain, jika variabel-variabel independen dalam penelitian ini tidak memiliki dampak terhadap Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota Provinsi Jambi, maka peningkatan pada indeks tersebut akan mencapai 93.08471. Namun, jika terdapat pengaruh dari variabel-variabel dalam penelitian ini, baik itu peningkatan atau penurunan, maka peningkatan pada Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota Provinsi Jambi tidak akan tetap pada angka 93.08471.

Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Gender

Nilai probabilitas untuk Derajat Desentralisasi Fiskal adalah 0.0039, dan koefisien untuk Derajat Desentralisasi Fiskal adalah 0.105036. Ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Gender. Dengan kata lain, jika Derajat Desentralisasi Fiskal meningkat sebesar 1 persen, maka Indeks Pembangunan Gender juga akan meningkat sebesar 0.105036. Hasil pengujian ini mengonfirmasi hipotesis pertama,

yaitu bahwa Desentralisasi Fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Gender di kabupaten/kota Provinsi Jambi.

Desentralisasi Fiskal adalah aspek penting dari otonomi daerah, yang merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan mereka sendiri. Untuk memastikan bahwa otonomi daerah memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat kabupaten/kota, perlu ada juga pemberian wewenang finansial yang memadai kepada daerah otonom.

Menurut pendapat Priyarsono dan rekan-rekannya (2010), otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan memberikan manfaat yang optimal jika didukung oleh kemampuan finansial yang memadai dari daerah otonom. Temuan ini sejalan dengan pandangan World Bank (2000), yang mengukur kemajuan pembangunan manusia melalui berbagai indikator, termasuk pengurangan kemiskinan, peningkatan literasi, penurunan tingkat kematian bayi, peningkatan harapan hidup, dan penurunan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, sebuah ekonomi yang kuat dan berkualitas mendukung pencapaian tingkat pembangunan gender yang tinggi.

Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Gender

Nilai probabilitas untuk Kemandirian Keuangan Daerah adalah 0.0072, dan koefisien untuk Kemandirian Keuangan Daerah adalah -0.060002. Hasil ini menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan antara Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Gender. Dengan kata lain, jika Kemandirian Keuangan Daerah mengalami peningkatan sebesar 1 persen, maka ini akan menyebabkan penurunan Indeks Pembangunan Gender sebesar -0.060002.

Pengaruh negatif ini mungkin disebabkan oleh kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap Indeks Pembangunan Gender. Fokus pemerintah lebih banyak pada pembangunan daerah secara umum, sehingga Kemandirian Keuangan Daerah cenderung berdampak negatif pada Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Jambi. Kemandirian Keuangan Daerah mencerminkan sejauh mana daerah dapat mengelola keuangannya sendiri untuk mendukung berbagai kegiatan di wilayahnya. Dengan kata lain, rasio ini mencerminkan tingkat ketergantungan daerah pada sumber daya eksternal.

Kemandirian keuangan setiap daerah dapat bervariasi tergantung pada sumber daya yang tersedia di daerah tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Mahmudi pada tahun 2007. Semakin tinggi rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin besar potensi pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik yang baik, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Gender. Temuan ini konsisten dengan penelitian Amalia dan Purbadharmaja (2014) serta Dewi dan Sutrisna (2014), yang menunjukkan bahwa rasio Kemandirian Keuangan Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan.

Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Gender

Nilai probabilitas untuk Efektivitas Pendapatan Asli Daerah adalah 0.0024, dan koefisien untuk Efektivitas Pendapatan Asli Daerah adalah -0.008089. Hasil ini mengindikasikan adanya pengaruh negatif yang signifikan antara Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Gender. Dalam konteks ini, jika Efektivitas Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 1 persen, maka ini akan menyebabkan penurunan Indeks Pembangunan Gender sebesar -0.008089.

Rasio Efektivitas mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan rencana, dibandingkan dengan potensi riil yang telah ditetapkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang mengukur berbagai aspek dasar kualitas hidup manusia. Perhitungan IPM bertujuan untuk mengukur dimensi dasar dari pembangunan manusia dan perluasan kebebasan dalam memilih.

Teori Human Capital, yang pertama kali dikemukakan oleh Adam Smith pada tahun 1776, menekankan bahwa investasi dalam pendidikan merupakan sumber daya manusia yang memberikan manfaat besar. Ini mencakup peningkatan peluang pekerjaan, kinerja yang lebih efektif, efisien, serta peningkatan kesejahteraan dan pendapatan individu. Penelitian sebelumnya yang mendukung temuan ini termasuk penelitian Wardana pada tahun 2016, yang menunjukkan bahwa efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.

SIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif Variabel Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Dan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah diperoleh kesimpulan bahwa perkembangan selama periode 2017-2021 mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun.
2. Berdasarkan analisis kuantitatif secara individu variabel Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandiria Keuangan Daerah, Dan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan gender
3. Berdasarkan analisis kuantitatif yang dilakukan diperoleh hasil bahwa secara bersama-sama variabel bebas dalam penelitian berpengaruh signifikan terhadap variabel bebas yaitu indeks pembangunan gender dengan probability sebesar 0,0000 dan R^2 sebesar 0.996630 yang berarti indeks pembangunan gender dapat dijelaskan oleh model sebesar 99.66% sedangkan 0.34% dipengaruhi oleh variabel diluar model.

DAFTAR PUSTAKA

- Darsyah, M. Y., & Sara, D. S. (2016). Seemingly Unrelated Regression Pada Indeks Pembangunan Gender Di Jawa Tengah. *Jurnal Statistika*, 4(2).
- Dheaanty, M., & Abdhullah, M. F. (2020). Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Keputusan Investasi Saham Di Danareksa Sekuritas. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 4(2), 238–246. <https://doi.org/10.22219/jie.v4i2.11626>
- Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik. (2021). Kajian Penghitungan Indeks Ketimpangan Gender 2021.
- Effendy, R. (2014). Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan. *Al-Maiyyah*, 07(2), 142–165.
- Fitri, agus zaenul, & Haryanti, N. (2020). Metode Penelitian Pendidikan kuantitatif,kualitatif dan Reasarch and Development. *Madani media*, 115.
- Wulansari, P. D. C. D. (2017). Sosiologi: Konsep dan teori. *Sosiologi Konsep dan Teori*, 1(08.05.2017), 11.
- Yani, F. (2014). ... APBD Berbasis Kinerja dan Pengawasan DPRD terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Daerah di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/870>
- Yunina, F. (2019). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tengah. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 9(1), 74–81. <https://doi.org/10.37598/jam.v9i1.647>
- Zarinah, M., & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten aceh Utara. *Jurnal Magister Akuntansi*, 5(1), 90–97.
- Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143–149. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.213>